

BAB IV

KERJASAMA INTERNASIONAL-INDONESIA DALAM MENEKAN PENINGKATAN SINDIKAT KEJAHATAN NARKOBA

Penanggulangan ancaman narkoba dan psikotropika di Indonesia tidak terlepas adanya kerjasama dan perjanjiannya dengan negara-negara lain, yang mempunyai kepentingan yang sama. Bentuk kerjasama internasional dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral. Pada umumnya kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan dalam upaya penanganan jaringan internasional narkoba dan psikotropika ini meliputi :

1. Pemutusan jalur distribusi yang dapat dicegah pada negara transit itu sendiri.
2. Dengan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang terlibat secara represif atau dalam penegakan hukum.
3. Kerjasama dalam bentuk bantuan dana dalam upaya penanganan masalah tersebut.
4. Kerjasama dalam tukar menukar informasi.¹⁰⁶

Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkoba pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*.¹⁰⁷ Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk :

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan

¹⁰⁶ Romli Atmasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya, Bandung, 1997, hal.65.

¹⁰⁷ http://www.incb.org/incb/convention_1961.html, diakses tanggal 23 Juni 2011.

internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.

2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut, dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya.¹⁰⁸

Di tingkat regional Asia Tenggara, kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika disepakati dalam *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Oktober 1972 di Manila. Tindak lanjut dari pertemuan di atas adalah *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs*, yang ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1976.¹⁰⁹ Isi dari deklarasi regional ASEAN ini meliputi kegiatan-kegiatan bersama untuk meningkatkan :

1. Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkotika.

¹⁰⁸Database Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2008. Dalam <http://legislasi.mahkamahagung.go.id>. Diakses tanggal 23 Juni 2011.

¹⁰⁹ Combating and Preventing Drug and Substance Abuse by Pratap Parameswaran Senior Officer ASEAN Secretariat. Dalam <http://www.aseansec.org>, diakses tanggal 23 Juni 2011.

2. Keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkotika
3. Membentuk bidang koordinasi di tingkat nasional; dan
4. Kerjasama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional.

Kemudian dibentuk *The ASEAN Senior Officials on Drugs (ASOD)* dan satu Forum Kerjasama Kepolisian antar negara-negara ASEAN (ASEANAPOL) yang antara lain bertugas untuk menangani tindak pidana narkotika transnasional di wilayah ASEAN.¹¹⁰ Selain itu, di tingkat negara-negara ASEAN juga dibentuk *Narcotic Board* dengan membentuk kelompok kerja penegakan hukum, rehabilitasi dan pembinaan, edukasi preventif dan informasi, dan kelompok kerja di bidang penelitian.

Adapun beberapa bentuk kerjasama Internasional Indonesia baik itu bilateral maupun multilateral, antara lain :

A. Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 pihak (individu/negara).¹¹¹ Kerjasama bilateral Indonesia tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Narcotics Control Bureau (NCB)

Indonesia adalah salah satu negara yang masuk dalam kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara dan berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Brunei Darussalam,

¹¹⁰ ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) Meeting In Partnership on Illicit Drug Control. Reporter: Jakarta 13 Oktober 2010. Dalam <http://www.bnn.go.id>. diakses tanggal 23 Juni 2011.

¹¹¹ id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100605045632AA65oj6, diakses tanggal 6 November 2011.

Indonesia berupaya untuk saling melakukan kerjasama dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut diwujudkan Indonesia melalui BNN sebagai badan yang khusus menangani masalah narkoba, mengadakan pertemuan khusus dengan *Narcotics Control Bureau* (NCB) yang bertempat di Kantor BNN, pada tanggal 23 Maret 2006. *Narcotics Control Bureau* adalah Badan Penanggulangan Narkoba dari Brunei Darussalam. Karena keduanya merupakan negara satu kawasan di Asia Tenggara, maka terus berkomitmen untuk membebaskan Asia Tenggara bebas narkoba.¹¹²

Dalam kunjungannya ke Indonesia, NCB memberikan bantuan teknis kepada BNN. Bantuan teknis tersebut berupa beberapa unit peralatan yang bisa digunakan oleh tim penyidik dalam melacak keberadaan seseorang melalui telpon seluler. Karena selama ini teknologi yang digunakan para pelaku tidak kalah canggih oleh aparat, maka bantuan tersebut sangat berguna bagi institusi pemerintah agar dapat menunjang kelancaran kinerjanya serta dapat menekan sindikat kejahatan narkoba tersebut dengan terungkapnya kasus-kasus yang ada.¹¹³

Selain itu, para tim dari Indonesia maupun Brunei Darussalam juga saling bertukar info tentang sistem kinerja yang telah dilakukan selama ini. NCB juga memberikan saran agar upaya pencegahan yang dilakukan melalui kampanye sifatnya harus merata. Karena selama ini yang terjadi, hanya sebagian masyarakat perkotaan yang mendapat pengetahuan tentang bahaya narkoba. Sebaliknya,

¹¹² "NCB Brunei Beri Bantuan Teknis Pada BNN," Kompas, 24 Maret 2006, hal. 25.

¹¹³ Ibid, hal. 25.

masyarakat pedesaan terutama dibagian pelosok, masih banyak yang belum memahami tentang pengertian maupun bahaya narkoba secara jelas.¹¹⁴

Saran dari NCB disambut positif oleh BNN dengan terus berkomitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, dalam langkah selanjutnya diharapkan BNN bisa menerapkannya secara berkesinambungan agar kasus narkoba tidak terus meningkat. BNN juga berharap kepada pemerintah, agar bantuan peralatan teknis bisa lebih ditingkatkan guna mendukung kinerja yang lebih maksimal.

Dari bantuan alat tersebut sedikitnya sudah 129 tersangka tertangkap sejak diberikan bantuan tersebut hingga awal tahun 2007. Contoh saja pada kasus narkoba Juli 2006 lalu, seorang warga negara Malaysia terditeksi keberadaannya setelah ketahuan menyeludupkan narkoba berjenis ganja dari aceh menuju ke perairan/pelabuhan Nongsa, Batam untuk dibawa ke Malaysia. Kecurigaan telah ada oleh pihak Bea dan Cukai di daerah Batam, yang mengira ia bukanlah warga negara Indonesia dan barang bawaannya tampak mencurigakan. Ia membawa ganja tersebut seberat 15 kg dengan menggunakan speedboat. Dikarenakan peralatan yang ada di perairan/pelabuhan Nongsa Batam itu sangat minim, maka pihak Bea dan Cukai meminta bantuan kepada Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau, Batam untuk menditeksi dari kejauhan benda apa yang dibawa oleh warga negara Malaysia tersebut. Dengan alat penditeksi tersebut akhirnya ketahuan juga bahwa yang dibawa olehnya adalah ganja yang beratnya hingga 15kg. Ketika dirinya mengetahui bahwa ia telah menjadi target operasional,

¹¹⁴ Ibid, hal.26.

tersangka berusaha melarikan diri, namun dengan adanya bantuan alat yang diberikan NCB tersebut keberadaan tersangka terdeteksi melalui GPS telpon seluler. Tersangka bersembunyi di pulau terpencil bernama Tanjung Siambang, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.¹¹⁵

Sindikatan kejahatan narkoba yang ada di negara Indonesia memanglah sangat meresahkan. Kenyataan yang ada kasus tersebut selalu mengalami peningkatan. Segala upaya telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, namun belum membuahkan hasil yang maksimal. Pada dasarnya kerjasama Indonesia dengan NCB sangatlah menguntungkan, dikarenakan adanya bantuan yang dapat memadai sarana kinerja pemerintah Indonesia dalam menekan peningkatan kejahatan narkoba, tetapi Indonesia belum bisa terbebas dari kejahatan narkoba. Pemerintah Indonesia sendiri tidak tinggal diam. Upaya demi upaya terus dilakukan agar Indonesia kelak akan terbebas dari kejahatan narkoba tersebut. Upaya tersebut ditunjukkan oleh Indonesia dengan terus dilakukannya kerjasama dengan NCB hingga saat ini, agar kedepannya permasalahan narkoba akan segera teratasi.¹¹⁶

2. Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Australian Federal Police (AFP)

Kejahatan penyalahgunaan narkoba harus ditangani secara serius dan lebih terorganisir. Sebab sindikat yang telah memiliki jaringan kuat, pasti memiliki sistem yang canggih pula. Untuk mengantisipasi, tentu aparat harus dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas operasional yang memadai. Kerjasama dengan *Australian Federal Police* (AFP) tidak hanya sebatas memberikan pelatihan,

¹¹⁵ Wawancara Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Bpk. AKBP. Raja Maenad Achmad, pada tanggal 29 Juni 2011.

¹¹⁶ "NCB Brunei Beri Bantuan Teknis Pada BNN," Kompas, 24 Maret 2006, hal. 26.

namun mereka juga mendukung perjuangan BNN dalam memerangi narkoba. Dukungan ini diwujudkan dengan memberikan bantuan berupa 7 unit mobil sebagai kendaraan operasional. Penyerahan mobil dari AFP dilaksanakan pada hari Jumat 23 November 2006, di depan kantor BNN. Dalam acara tersebut bantuan diserahkan langsung oleh perwakilan dari AFP kepada ketua BNN. Bantuan tersebut berupa 7 unit kendaraan operasional mobil kijang innova, untuk Direktorat IV/Narkoba BNN. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari AFP menyerahkan kunci mobil pada Brigjen Polisi Indradi Thanos yang diteruskan pada Polwan termuda.¹¹⁷

Saat ini Indonesia sudah bukan lagi menjadi negara konsumen narkoba, tetapi sudah menjadi negara produsen narkoba yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Untuk menangani narkoba harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. Dalam kasus seperti ini merupakan suatu tantangan berat bagi BNN.¹¹⁸ Untuk menanganinya mutlak dilakukan kerjasama antar aparat penegak hukum dari semua negara, karena kejahatan narkoba adalah kejahatan global. Jadi harus ada kerjasama antar negara dengan kegiatan operasi bersama (*joint investigation*) dan pengembangan (*capacity building*). Kegiatan operasi bersama terwujud dalam penangkapan terhadap pelaku. Hal seperti ini memang mutlak dilaksanakan mengingat pelaku yang bersindikatis internasional.

Dalam pengembangan (*capacity building*), institusi AFP menyediakan sumber daya manusianya untuk memberikan pelatihan bersama dalam teknis

¹¹⁷ AFP Beri Bantuan Kendaraan Operasional Pada BNN, "Sadar, Tabloid Dua Mingguan Badan Narkotika Nasional, No.XXII/Thn.I/2007, hal. 17.

¹¹⁸ http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=3407&coid=3&caid=22&gid=4, diakses tanggal 14 Agustus 2011.

penyelidikan dan juga bantuan pengembangan peralatan pendukung yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Tujuannya untuk menambah profesionalisme para aparat dalam menangkap para penjahat narkoba dan hasilnya pemerintah Indonesia berhasil melakukan penangkapan beberapa sindikat kejahatan narkoba bertaraf Internasional, seperti tertangkapnya warga negara Iran yang kedapatan membawa heroin seberat 1kg, dengan cara dikemas ke dalam pembalut wanita di Bali, tahun 2007 lalu.¹¹⁹

Pelatihan yang diberikan oleh AFP berupa pelatihan dasar bagaimana mengintai sindikat pelaku kejahatan atau pelatihan intelejen serta pelatihan buser atau pemburuan, penyergapan dan penyelidikan para pelaku kejahatan narkoba dengan sistematis yang di program oleh AFP. Pelatihan tersebut dilakukan pada 22-29 Juni 2009 lalu, yang dilaksanakan di Akademi Kepolisian, Semarang, yang dihadiri 20 anggota AFP, Perwakilan kepolisian daerah pada tiap-tiap provinsi khususnya pada bagian intelkam dan reskrim serta perwakilan anggota BNN, BNP dan BNK.¹²⁰

BNN sebagai institusi/badan pemerintah yang menangani masalah narkoba telah menjalin kerjasama dengan AFP dan institusi kepolisian internasional lainnya dalam mengungkap jaringan narkoba internasional. Kerjasama tersebut telah terjalin sejak lama, baik dengan BNN dan Polri. Oleh karenanya, dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memotivasi para aparat hukum di Direktorat IV/Tindak Pidana Narkoba dan Badan Reserse Kriminal Polri dalam menjalankan tugasnya dengan baik demi meminimalisir kejahatan narkoba di Indonesia.

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Wawancara dengan Pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Bpk. AKBP. Raja Maenad Achmad, pada tanggal 30 Juni 2011.

Walaupun kenyataannya kejahatan narkoba di Indonesia masih banyak terjadi, setidaknya bantuan-bantuan yang diberikan oleh AFP dapat menunjang kinerja para institusi pemerintah untuk dapat mengungkap sindikat kejahatan narkoba sebanyak-banyaknya dan dari kerjasama tersebut sangat menguntungkan bagi Indonesia dengan diberikannya berbagai bentuk bantuan.

3. Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Drug Enforcement Administration (DEA)

Dalam penggrebekan pabrik shabu di Batam pada tanggal 20 Oktober 2007, tim ahli dari BNN masih belum bisa mengidentifikasi beberapa bahan mentah dari sejumlah barang bukti yang telah disita. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BNN mengundang beberapa tim ahli forensik dari *Drugs Enforcement Administration (DEA)* Amerika untuk membantu proses identifikasi tersebut. Selain mengidentifikasi tentang jenisnya, juga akan diselidiki mulai dari nomor registrasi dalam kemasan bahan-bahan tersebut untuk mengetahui asal mula bahan. Jenis bahan-bahan yang belum teridentifikasi, misalnya yang ditemukan dipabrik pengolahan pertama di Kompleks Pergudangan Taman Niaga Blok E/3, Muka Kuning, Batam. Bahan tersebut berupa bubuk dengan berat 1.000 kg yang berlabel tulisan Cina pada kemasannya. Selain itu, juga terdapat 330 galon cairan kimia berkemasan tulisan Cina.¹²¹

Dengan adanya bantuan ini jelas akan membantu kinerja pemerintah Indonesia khususnya dalam hal identifikasi. Kemampuan Indonesia seperti ini memang cukup terbatas, oleh karena itu dalam kesempatan ini pemerintah

¹²¹ "Ahli Forensik DEA AS Bantu Identifikasi Bahan Mentah", Kompas, 26 Oktober 2007, hal. 13.

Indonesia yang diwakili oleh BNN berupaya mempelajari cara-cara yang dilakukan oleh DEA dalam proses identifikasi. Sehingga untuk ke depannya BNN berharap, agar dapat melakukan identifikasi sendiri tanpa harus adanya bantuan dari pihak lain.

Sebelumnya, Amerika yang diwakili oleh DEA juga pernah memberikan bantuan dana dalam bantuan cek senilai 287.777 dolar AS atau setara dengan Rp.2,87 milyar. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Markas Besar Polri, pada hari Rabu 16 Nopember 2005 dan diwakili oleh Jaksa Agung Amerika Alberto Gonzales kepada Kapolri Sutanto. Bentuk pemberian hasil penjualan aset itu merupakan yang pertama kali dilakukan dalam sejarah penanganan kasus narkoba antara Indonesia dan Amerika Serikat. Selain menyerahkan cek, pemerintah Amerika juga memberikan bantuan senilai jutaan dolar bagi penegakan hukum di Indonesia, baik dalam bentuk pelatihan, perlengkapan, serta bantuan teknis bagi penyidik antiterorisme, staf antinarkoba, polisi perairan, jaksa dan penegak hukum lainnya. Dalam hukum Amerika, jika pada suatu kasus ada dana yang disita otoritas Amerika, maka uang itu boleh dibagikan dengan negara lain yang membantu pengungkapan kasus yang terkait warga Amerika tersebut.¹²²

Meskipun bantuan-bantuan yang telah diberikan DEA belum dapat membuat wilayah dan bangsa Indonesia terbebas dari sindikat kejahatan narkoba, namun pemerintah Indonesia berharap agar bantuan tersebut bisa direalisasi seoptimal mungkin agar kedepannya Indonesia steril akan kejahatan narkoba, minimal

¹²² "RI Terima Premi 287.577 Dolar AS Dari Hasil Penyitaan Aset Kasus Narkoba", Kompas, 17 November 2005, hal. 26.

kejahatan narkoba dapat terungkap satu persatu dan jaringannya terputuskan hingga kedepannya kasus narkoba tersebut dapat ditekan peningkatannya.

B. Kerjasama Multilateral

Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak pihak (individu/negara).¹²³ Kerjasama multilateral Indonesia antara lain :

1. Kerjasama Multilateral Indonesia dengan UNODC, ACCORD, MFLF dan Beberapa Instansi Luar Negeri Terkait

Badan narkoba dunia seperti *United Nation On Drugs Crime* (UNODC) melihat bahwa kinerja yang dilakukan Indonesia selama ini masih belum optimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah masalah dana. Upaya yang dilakukan UNODC dalam mengatasinya adalah dengan memberikan bantuan dana pada Indonesia melalui BNN pada tanggal 15 Agustus 2007. Bantuan tersebut berupa komputer berisi program pelatihan perdagangan manusia, narkoba, teroris dan tindak kejahatan lain dari UNODC. UNODC juga mengadakan program pelatihan bahasa Indonesia yang dilakukan secara serentak di 52 negara. Program pelatihan bahasa dimaksudkan agar negara lain lebih mudah menjalin komunikasi dengan Indonesia. Menurut rencana, program pelatihan ini akan dikembangkan ke Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ada di Lemdiklat Polri. Selain itu juga akan dibangun 10 tempat pelatihan pengoperasian program, yang dananya bersumber dari bantuan UNODC tersebut. Adapun 10 tempat pelatihan tersebut adalah Akpol, *Jakarta Center For Law Enforcement Cooperation* (JCLEC), Bareskrim

¹²³ id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100605045632AA65oj6, diakses tanggal 6 November 2011.

Polri, BNN, Bogor, Bali, Medan, Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok.¹²⁴

UNODC selama ini telah membantu 52 negara untuk penanggulangan kejahatan transnasional, seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan lainnya. Dengan adanya modul belajar interaktif ini akan membantu siswa untuk meningkatkan ketrampilannya. Ada 10 program dan dibagi menjadi 76 modul secara keseluruhan. Bisa diakses bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dengan adanya program seperti ini, Pemerintah Indonesia berharap kinerja yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Karena selama ini peralatan teknologi yang ada juga dianggap masih kurang. Selain itu dengan adanya program pelatihan menangani kejahatan khususnya narkoba, bisa menambah pengetahuan bagi institusi pemerintah dalam hal ini Tim dari BNN dan untuk ke depannya bisa berguna bagi kelangsungan kinerja.¹²⁵

Setelah kerjasama tersebut, pada tanggal 18 sampai 20 September 2007 BNN kembali bekerjasama dengan UNODC dan ACCORD (*ASEAN and China Cooperative Operation in Response to Drugs*). ACCORD merupakan sebuah organisasi kerjasama negara-negara ASEAN serta Cina, dalam membahas permasalahan narkoba dan mencari solusi bersama dalam menyusun program-program pencegahan, penegakan hukum, serta terapi dan rehabilitasi. Hal yang mendasari terbentuknya ACCORD adalah karena masalah narkoba yang terus mengkhawatirkan khususnya di kawasan Asia dan mencari solusi bersama untuk mengatasinya. UNODC sebagai badan dunia yang menangani narkoba, melihat

¹²⁴ "Bantuan Infrastruktur UNODC Pada BNN", Sadar, Tabloid Dua Mingguan Badan Narkotika Nasional, No. XVIII/Thn.I/2007, hal. 23.

¹²⁵ Ibid, hal 24.

bahwa permasalahan narkoba di Asia sudah sangat mengkhawatirkan. Menanggapi hal tersebut, UNODC melalui *Project Coordinator Regional* bidang pencegahannya, mengadakan pelatihan dan *workshop* tentang strategi komunikasi dalam menangkal bahaya narkoba. Acara ini dilaksanakan di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta.¹²⁶

Dalam *event* kali ini, yang perlu ditekankan adalah aspek pencegahan pada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu, perlunya pelatihan serta *workshop* adalah dengan saling berbagi pengalaman serta pengetahuan tentang bagaimana sebuah negara melakukan pencegahan pada penyalahgunaan narkoba dengan cara maupun metode masing-masing. Hingga saat ini, negara-negara ASEAN sudah mulai bergerak dalam menangani narkoba walaupun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Tetapi, semuanya telah melakukan apa yang dianggap terbaik untuk mencegah tindak penyalahgunaan narkoba. Indonesia khususnya BNN, telah melakukan berbagai upaya untuk menangani peredaran narkoba. Dalam program pelatihan ini, masing-masing negara akan mempresentasikan tentang apa saja program yang telah dilakukan dan bagaimana efeknya bagi masyarakat. Serta menjelaskan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalankan program tersebut. Dari kerjasama ini, pemerintah Indonesia berharap akan timbul *input* dari tiap negara dengan saling mentransformasikan pengetahuan dan pengalamannya. Dengan cara ini, maka akan timbul kolerasi positif yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam *event* ini juga membicarakan tentang kinerja negara Singapura sebagai

¹²⁶ Ibid, hal 26-30.

perbandingan, dimana sudah memiliki sistem dan mekanisme yang cukup baik dalam menangani kasus narkoba. Sebagai contoh bila ada orang yang membawa heroin seberat 10 gram, maka jelas akan divonis hukuman mati. Adanya Supremasi hukum yang baik, menjadikan negara ini tegas dalam menindak penjahat narkoba, sehingga menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Berbeda dengan Indonesia, yang masih lemah dalam menangani narkoba, terutama dalam penegakan hukum. Dengan adanya *workshop* ini diharapkan pemerintah Indonesia lebih tegas dalam pelaksanaan hukuman bagi pelaku kejahatan narkoba. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2007, digelar kampanye oleh pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BNN yang juga dihadiri Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Direktur Eksekutif UNODC Antonio Maria Costa, Duta Besar Thailand untuk Indonesia Akrasit Amatayakul, Ketua Komisi Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam, dan Timor Leste Luis Lediguero, Sekretaris Yayasan Mae Fah Lung (MFLF) Mom Rajawongse Disnadda Diskul, *Project Officer Alternative Development (AD)* Ahwil Lutan, Bupati Aceh Besar Bukhari Daud dan undangan lainnya. Kampanye ini dilaksanakan di Desa Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Aceh Besar, yang terkenal dengan wilayah penghasil ganja terbesar di Aceh.¹²⁷

Selama ini Aceh dikenal sebagai lumbung ganja nasional yang peredarannya telah mencapai lintas bangsa. Dalam kampanye ini pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan UNODC dan badan luar negeri terkait lainnya untuk menangani kejahatan narkotika, khususnya ganja yang banyak ditanam di Aceh. Salah satu

¹²⁷ <http://www.accord-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=330>, diakses tanggal 17 Oktober 2011.

faktor yang mempengaruhi banyaknya peredaran ganja di Aceh adalah kebiasaan masyarakat yang selalu menggunakan ganja sebagai bumbu dapur dalam memasak. Oleh karena itu, kampanye ini akan memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang efek negatif dari ganja. Sebagai solusinya masyarakat diajak untuk menggerakkan pembangunan alternatif (*alternative development*), seperti menanam sayuran ataupun tanaman lain yang mempunyai nilai ekonomis. Upaya tersebut akan dilakukan melalui program *sustainable alternative livelihood development* (SALD) oleh Mae Fah Lung Foundation (MFLF), yaitu satu yayasan yang langsung berada di bawah pengawasan Raja Thailand Bhumipol Adulyadej. Sebagai peresmiannya, turut ditandatangani MoU oleh BNN, UNODC, MFLF dan beberapa instansi terkait lainnya, dengan visi dan misi Aceh bebas ganja untuk 10 tahun ke depan. Program ini menekankan pada pelatihan masyarakat setempat agar mereka dapat mandiri, sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberhasilan yang berkelanjutan.¹²⁸

Walaupun sebelumnya banyak masyarakat Aceh yang menanam ganja, namun kesejahteraan hidup yang dirasakan juga tidak meningkat. Oleh karena itu, dengan adanya program ini diharapkan kesejahteraan masyarakat Aceh bisa semakin meningkat. Untuk selanjutnya, pemerintah Indonesia akan terus melakukan pembinaan kepada masyarakat Aceh menyangkut masalah ini dan melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat agar ikut membantu dalam program Aceh bebas ganja. Selain itu, MFLF sebagai badan pengawas juga ikut aktif bersama pemerintah dalam mensukseskan program ini.

¹²⁸ "Membebaskan Aceh Dari Ganja", Sadar, Tabloid Dua Mingguan Badan Narkotika Nasional, No.XXV/Thn.I/2007, hal. 18-19.

Dalam kerjasama bentuk lain, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BNN mengadakan operasi gabungan (*joint investigation*). Operasi gabungan merupakan tindakan untuk menangkap pelaku kejahatan narkoba dengan dibantu oleh berbagai pihak. Penangkapan ini tidak hanya melibatkan pihak Indonesia, tetapi juga oleh pihak luar negeri. Pihak dari luar negeri awalnya memberi informasi kepada BNN, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan. Bentuk penangkapan tersebut yaitu berupa kerjasama (*Represif*) Badan Narkotika Nasional Dengan Instansi Dalam dan Luar Negeri. Tindakan *represif* yang dilakukan pemerintah Indonesia akan berjalan efektif jika adanya keterlibatan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terkait dengan penangkapan terhadap pelaku yang bersindikatis internasional.

Keefektifan dari kerjasama ini dibuktikan dengan pengungkapan dua kasus pabrik narkoba berskala internasional, yang berlokasi di Indonesia. Dua pabrik narkoba tersebut masing-masing berlokasi di Serang dan Batam.¹²⁹

Pada pengungkapan kasus pabrik di Serang, Banten (27 Januari 2006), melibatkan tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), BNN, Polri, DEA, *Narcotics Bureau Hongkong Police* (NBHP) dan AFP. Dari operasi gabungan ini berhasil mengungkap pabrik ekstasi dan shabu-shabu serta gudang penyimpanan bahan kimia/prekursor dan peralatan laboratorium gelap yang masih terkait dengan kss lab di Cikande 11 November 2005, dengan tersangka Benny Sudrajat yang akhirnya di vonis mati. Tim tersebut juga melakukan penggrebekan pabrik ekstasi dan shabu-shabu di desa Cemplang,

¹²⁹ "Berbagai Kasus Narkoba Terbesar di Indonesia", Suara Merdeka, 13 Desember 2007, hal. 10.

Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Keberhasilan ini juga berkat adanya koordinasi yang dilakukan antara DEA dan BNN. Hal ini sesuai dengan fungsi BNN yang salah satunya meliputi pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional, dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya. Atas informasi yang telah diberikan DEA berupa laporan tentang adanya *shipment container* yang dicurigai membawa mesin pembuat ekstasi dan shabu-shabu dari Taiwan, maka pihak BNN langsung mengkoordinasikan dengan Bea dan Cukai. Sebagai badan yang mengurus masalah keluar masuknya barang di pelabuhan, maka pihaknya berhak untuk menahan barang yang masuk. Dari serangkaian investigasi yang dilakukan, akhirnya BNN dan para tim berhasil melakukan penggrebekan terhadap laboratorium gelap dan pabrik pembuat ekstasi serta shabu-shabu tersebut.¹³⁰

Atas segala koordinasi yang dilakukan instansi pemerintah yaitu BNN selama ini, ternyata menunjukkan kinerja yang memuaskan. Terbukti dengan dilakukannya penggrebekan laboratorium gelap dan juga pabrik shabu dan ekstasi di Serang, Banten. Bila kasus ini tak terungkap, maka jelas akan membuat sindikat kejahatan narkoba dan para korban semakin bertambah yang berdampak pada rusaknya para generasi penerus bangsa.

Kemudian pada pengungkapan kasus kedua yang berlokasi di Batam, melibatkan berbagai pihak, antara lain DEA Taiwan, DEA Singapura, DEA Hong Kong, DEA Amerika, BNN dan Polri. Penggrebekan ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 2007, yang dilakukan oleh BNN dan Polri di Taman Niaga Blok E No. 3

¹³⁰ "BNN Mengungkap Sindikat Narkoba di Serang", Kompas, 13 November 2006, hal. 8.

Kawasan Industri Panbil, Muka Kuning, Batam. Tempat ini digunakan sebagai proses pengolahan pertama *clandestine laboratory*, yaitu proses pengolahan precursor menjadi shabu cair kualitas rendah. Sebuah rumah di Perumahan Taman Duta Mas, Cluster II No. 57, Batam Center, merupakan gudang penyimpanan hasil proses pertama *clandestine laboratory*. Lokasi lain di kawasan berikat Simpang Frangky Batam Center, merupakan tempat pengeringan dan proses masak dengan mesin serta satu ruko di komplek Hop Seng Blok C No. 8, Batam Center, yang menjadi tempat pengolahan akhir. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi DEA Hong Kong yang mengirim surat elektronik (*email*) pada BNN. Surat tersebut berisikan bahwa ada kecurigaan tentang keberadaan pabrik narkoba yang berlokasi di Batam. Kemudian BNN menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi pada Polri kemudian diteruskan pada pihak kepolisian di Batam. Kerjasama intensif kemudian dijalin antara BNN, Polri, DEA Hong Kong, DEA Taiwan, DEA Singapura dan DEA Amerika. Setelah menunggu waktu beberapa bulan dan mendapat bukti kuat, akhirnya tim gabungan melakukan penggrebekan terhadap pabrik tersebut.¹³¹

Dari semua kinerja yang dilakukan pemerintah Indonesia selama ini, terdapat berbagai macam kasus yang telah diungkap. Walaupun masalah tentang narkoba belum bisa diselesaikan secara tuntas, tetapi dengan terungkapnya kasus sindikat kejahatan narkoba cukup membantu dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia sehingga jaringan narkoba pun dapat terputus dan peredaran kasus narkoba di Indonesia dapat diminimalisir kedepannya.

¹³¹ "BNN Bongkar Pabrik Shabu di Batam", Kompas, 13 November 2007, hal. 25.